

Pengaruh Program Desa Wisata Terhadap Perkembangan Ekonomi Desa Dan Pelestarian Budaya Lokal

Oleh:

¹Natasya Mentari Putri Lusi; ²Prilia Resa Anggriana

^{1,2} Jurusan Kebijakan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Airlangga
Email: natasya_lusi@yahoo.com

Abstrak

Pengembangan desa agar dapat menjadi desa wisata merupakan program yang tepat untuk menstimulus pendapatan asli desa dan memperkenalkan potensi yang dimiliki setiap desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh program desa wisata terhadap perkembangan ekonomi desa dan pelestarian budaya. Metode yang peneliti gunakan yaitu metode *library research*. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa desa wisata yang mampu meningkatkan perekonomian desa, namun terdapat desa wisata yang belum mampu meningkatkan perekonomian desa. Hal ini dikarenakan kurangnya peran *stakeholder* dalam sosialisasi atau pemberian pemahaman terhadap masyarakat di desa wisata agar mampu mengembangkan potensi di desa mereka, akibatnya beberapa masyarakat desa tidak mampu berinovasi. Kerja sama antar *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata menjadi kunci positif untuk pengembangan desa wisata. Pemanfaatan budaya lokal oleh suatu desa bisa menjadi daya tarik kepada wisatawan asing maupun lokal. Sehingga sangat diperlukan koordinasi dan pelatihan bagi masyarakat desa agar mampu mengembangkan desa yang mereka miliki, sekaligus memperkenalkan keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh Indonesia.

Kata Kunci : Desa Wisata; Peningkatan Ekonomi; Pelestarian Budaya

Abstrack:

Village development so that it can become a tourist village is the right program to stimulate the village's original income and introduce the potential of each town. This study aims to explain the influence of the tourism village program on the village's economic development and culture preservation. The method that the researcher uses is the library research method. The results of this study are that several tourist villages can improve the village economy. Still, some tourist villages have been unable to improve the village economy. This is due to the lack of stakeholder roles in socializing or providing understanding to the community in tourist villages to develop the potential in their villages; as a result, some village communities are unable to innovate. Cooperation between stakeholders in tourism development is key to developing tourist villages. The utilization of local culture by a town can be an attraction to foreign and local tourists. So it is essential to coordinate and train rural communities to develop their villages and introduce the cultural diversity that Indonesia has.

Keyword: Village Tourism; Economic Improvement; Cultural Preservation

PENDAHULUAN

Industri pariwisata merupakan industri yang memberikan stimulus dana cukup besar terhadap devisa. Selama tahun 2014, industri pariwisata berkontribusi sebanyak

Rp 136 triliun, serta pertumbuhan pariwisata di Indonesia sudah mencapai angka 7,2% dan sudah melebihi rata-rata angka pertumbuhan industri pariwisata di dunia yang hanya sebanyak 4,7% (Katadata.co.id). Penyumbang pendapatan terbesar di sektor pariwisata yaitu Bali, yang menyumbang hampir 50%. Sehingga tidak salah jika dikatakan pertumbuhan pariwisata di Indonesia memberikan dampak positif seperti terciptanya lapangan pekerjaan, meningkatnya pendapatan dan taraf hidup, serta pada perkembangan sektor lainnya Wibawa & Budiasa (2018) Untuk menarik para wisatawan lebih banyak lagi, pemerintah menyiapkan program yaitu desa wisata. Ini merupakan alternatif yang ditawarkan pemerintah untuk menarik wisatawan asing dan domestik dengan menawarkan keunikan yang terdapat di setiap daerah. Hal ini diperjelas dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM.001/MKP/2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025. Dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tersebut dijelaskan bahwa program desa wisata merupakan upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan memberdayakan masyarakat, pengembangan desa wisata tersebut mengandalkan pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Dalam mendukung program ini, peran pemerintah desa sangatlah dibutuhkan. Sehingga kewenangan yang diberikan oleh desa untuk mengelola sendiri pemerintahnya yang diatur dalam PP No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Prinsip dari desa wisata adalah untuk memberdayakan masyarakat, mengembangkan budaya lokal dan potensi desa, serta menjaga kelestarian alam dan melindungi lingkungan hidup.

Desa wisata menurut Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata (2010) adalah suatu kesatuan bentuk atraksi, akomodasi dan fasilitas penunjang, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Sedangkan Paresh Joshi (2012) berpendapat desa wisata adalah wisata yang terdiri dari pengalaman pedesaan, atraksi alam, tradisi dan elemen unik yang dapat menarik wisatawan secara keseluruhan. Sehingga pembangunan desa wisata menjadi pendekatan yang sangat tepat agar pendapatan asli desa meningkat. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2019 Indonesia memiliki 83.820 desa yang tersebar dari provinsi Aceh sampai Papua. Sedangkan yang tercatat sebagai desa wisata sekitar 1.303 desa wisata (tahun 2014) dan meningkat menjadi 1.734 desa sejak tahun 2018. Sedangkan tahun 2021, menurut peserta Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI), jumlah desa wisata yang telah di miliki Indonesia sebanyak 1.831 desa wisata. Jumlah desa wisata yang semakin hari semakin meningkatkan diharapkan mampu memberikan dampak bagi potensi ekonomi khususnya masyarakat lokal di sekitar. Dengan meningkatkan potensi di desa wisata juga akan mampu meningkatkan sektor pariwisata dan perekonomian kreatif di Indonesia. Tentu untuk membangkitkan sektor pariwisata terkhususnya desa wisata perlu dukungan dari berbagai stakeholder terlebih

pemerintah desa. Peran berbagai *stakeholder* perlu untuk membantu masyarakat dalam menggali potensi yang dimiliki di desa mereka, sehingga desa yang mereka punya memiliki daya tarik yang berbeda bagi para wisatawan. Komitmen antar *stakeholder* yang ada di desa dibutuhkan untuk menyamakan argumen dan persepsi agar keunikan yang dimiliki desa bisa diangkat menjadi desa wisata.

Namun terdapat beberapa permasalahan yang muncul akibat dari kurang kerja sama antar *stakeholder*. Hal ini dipaparkan dalam jurnal Annatasya (2022) yang menilai bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Desa wisata Nongkosawit adalah *stakeholder* tidak melibatkan masyarakat sekitar dalam upaya mengembangkan desa wisata. Padahal agar desa tersebut dapat terus berjalan dengan baik, masyarakat lokal harus ikut terlibat dalam perencanaan hingga pengimplementasiannya. Karena salah satu tujuan dari desa wisata adalah membantu perekonomian masyarakat di desa tersebut. Tidak melibatkan masyarakat dalam proses mengembangkan Desa Wisata Nongkosawit akan menimbulkan kecemburuan antar anggota yang akan berakibat konflik. Selain itu, ketika masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pengembangan desa wisata, akan membuat masyarakat kesulitan memahami potensi desa, akhirnya desa wisata kurang diminati oleh wisatawan.

Permasalahan yang sama dijelaskan dalam penelitian Mertha et al. (2018). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat permasalahan yang terjadi di desa wisata bali adalah ketidaksiapan masyarakat setempat menerima dampak yang terjadi dari pengembangan desa wisata di Bali. Ketidaksiapan masyarakat dapat dilihat dari kurangnya inisiatif dan kreativitas untuk mengembangkan potensi desa wisata yang mereka miliki. Tokoh masyarakat kurang mampu memotivasi dan mendorong masyarakat di desa wisata Bali untuk mengembangkan kekayaan yang dimiliki oleh setiap desa mereka sehingga dapat dijadikan destinasi tujuan wisata. Masih kurangnya komitmen antar *stakeholder* tentu akan mempengaruhi pengelolaan desa wisata, ketika pengelolaan desa wisata tidak baik, para wisatawan tentu enggan berkunjung ke desa wisata tersebut. Minimnya wisatawan tentu akan mempengaruhi perekonomian di desa wisata. Hal ini dijelaskan dalam penelitian Rezza (2016) yang menjelaskan bahwa kurangnya peran *stakeholder* mempengaruhi perkembangan Desa Wisata Wonolopo yang terletak di Kota Semarang. Dimana Desa Wisata tersebut tidak mampu berkembang karena Pemda Kota Semarang belum menjalin kerja sama dengan baik dengan Kelompok Sadar Wisata Wonolopo dan masyarakat Desa Wisata Wonolopo untuk mengelola desa wisata ini. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis ingin melihat bagaimana pengaruh program desa wisata terhadap perkembangan ekonomi desa dan pelestarian budaya lokal. Dimana peneliti akan menggunakan analisis dampak untuk melihat dampak yang diberikan dari pengembangan desa wisata terhadap perkembangan ekonomi desa dan pelestarian budaya lokal. Analisis dampak ini berupa dampak ekonomi dan dampak secara budaya, apakah pengembangan desa

wisata mampu melestarikan budaya lokal yang dimiliki oleh desa tersebut akibat dari pengembangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kepustakaan (*library research*). Pendekatan kepustakaan menurut Zed (2008) adalah penelitian yang menggunakan sumber seperti buku-buku, jurnal atau dokumen yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti. Peneliti akan menggunakan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata. Data-data terkait pengembangan desa wisata yang telah dikumpulkan dan didapatkan dari berbagai sumber yang ada akan peneliti olah, analisis, dan interpretasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Wisata Menjadi Ruang Masyarakat Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian

Desa diberikan kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahnya sesuai dengan hak tradisional dan hak asal usul yang dimiliki oleh setiap desa sesuai dengan sistem pemerintahan NKRI. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintahan desa diharapkan mampu membangkitkan potensi yang ada di setiap desa. Hal ini diperjelas dalam penelitian Walidaya (2013) yang menjelaskan bahwa pemerintah desa memiliki tugas sebagai pengelola pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan masyarakat. Sehingga perlu adanya peningkatan kemampuan pemerintah desa atau berbagai *stakeholder* dalam menjalankan tugas-tugas administrasi dan mendorong partisipasi masyarakat agar terlibat membantu pemerintah dalam mengembangkan desa wisata.

Adanya wewenang tersebut maka pemerintah desa melakukan suatu pengelolaan terhadap desa sesuai dengan aturan perundangan yang ada. Adapun pengelolaan desa bisa berupa, pemberdayaan masyarakatnya dan juga pembangunan desa dengan menggali kekayaan sumber daya alam sebagai kearifan lokal yang ada dalam suatu daerah. Pembangunan desa bertujuan sebagai sarana meningkatkan kualitas hidup dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, dengan melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat Syaifudin & Ma'ruf (2022). Upaya yang dilakukan dalam pengembangan desa adalah menjadikan desa menjadi desa wisata. Program desa wisata dapat menjadi ruang bagi masyarakat desa untuk meningkatkan perekonomian. Terdapat beberapa desa wisata yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Dalam penelitian Singgih (2020) desa Pujon Kidul yang merupakan desa wisata di Kabupaten Malang berhasil meningkatkan PADes Pujon Kidul. Dalam satu dekade PADes Pujon Kidul meningkat drastis menjadi Rp 1,4 miliar.

Peningkatan pendapatan juga terjadi pada Desa Wisata Nglanggeran yang berada di Kabupaten Gunung Kidul (Wahyuni (2018). Terdapat beberapa area yang bisa dijadikan daya tarik di Desa wisata ini yaitu Gunung Api Purba, Embung

Nglanggeran, dan Air Terjun Musiman. Hal ini mengakibatkan banyaknya masyarakat yang mampu menciptakan lapangan kerja seperti usaha makanan di sekitar area destinasi tersebut Hary (2016) Selain itu peningkatan pemasukan pemerintah terjadi karena adanya retribusi tiket wisata. Sehingga PAD meningkat secara bertahap terus meningkat sampai tahun 2017 naik sebesar adalah Rp1,9 M dari Rp1 M.

Namun terdapat beberapa desa wisata yang belum meningkatkan pendapatan desa mereka. Hal ini dapat dilihat dari penelitian Ratnaningtyas & Widyasmoro (2017) sumber daya manusia Desa Wisata Kalibuntung ini belum siap dalam artian belum mampu mengelola desa wisata ini dengan baik. Ketidakmampuan dalam mengelola potensi desa wisata akan berdampak kurang menariknya desa wisata Kalibuntung dimata wisatawan, dikarenakan kurangnya inovasi dari masyarakat lokal dan belum mampunya masyarakat lokal untuk menggali potensi desa, yang lambat laun akan menurunkan wisatawan yang datang ke desa wisata tersebut. Penurunan wisatawan nantinya akan berdampak pada penurunan pendapatan masyarakat lokal.

Hal senada dijelaskan dalam jurnal Dewi (2013) kurangnya partisipasi masyarakat setempat yang ada di Desa Wisata Jatiluwih dalam pengembangan desa wisata tersebut mengakibatkan masyarakat desa tersebut menjadi miskin. Mayoritas masyarakat lokal Desa Wisata Jatiluwih ini adalah petani aset satu-satunya yang mereka miliki yaitu tanah, dijual kepada wisatawan, akibat perekonomian masyarakat lokal di Desa tersebut tidak mengalami peningkatan. Selain itu kebijakan pemerintah yang lebih memihak kepada investor daripada masyarakat lokal menunjukkan semakin nyatanya ketidakadilan dalam pengembangan di Desa wisata Jatiluwih.

Dalam upaya meningkatkan perekonomian masyarakat desa dalam program desa wisata, sudah seharusnya pemerintah dan berbagai stakeholder ikut melibatkan masyarakat lokal agar mampu meningkatkan perekonomian mereka. Karena desa wisata merupakan ruang yang bisa digunakan oleh masyarakat lokal untuk meningkatkan perekonomiannya. Namun nyatanya tidak semua desa wisata mampu meningkatkan perekonomiannya.

Kontribusi Masyarakat Desa dalam mengembangkan Potensi Desa Wisata

Pengembangan program desa wisata, masyarakat mempunyai peran penting dalam menyukseskan program tersebut. Kesuksesan suatu program pemerintah desa akan tepat sasaran apabila program tersebut sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat itu sendiri. Dengan melakukan pembangunan terhadap sektor wisata yang ada dalam desa tersebut, maka daerah tersebut akan bisa berkembang dan juga mempunyai menarik di mata wisatawan yang akan mengunjungi desa wisata tersebut dan tentunya akan meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di desa tersebut.

Hal tersebut didukung juga dengan penelitian Febriana & Pangestuti (2018) di mana dalam kajiannya menemukan pengembangan kepariwisataan di Desa Wisata Gubugklakah telah melibatkan masyarakat, lembaga-lembaga desa, hingga investor. Masyarakat telah dilibatkan dalam penyediaan homestay, pengolahan oleh-oleh,

pengembangan usaha perdagangan, pengembangan destinasi wisata, hingga pengembangan agrowisata. Pelibatan masyarakat sejauh ini belum mencakup keseluruhan masyarakat, sehingga masih terdapat masyarakat yang belum merasakan dampak positif dalam bidang ekonomi. Pengembangan kepariwisataan juga telah mengundang minat investor untuk berinvestasi. Investor yang datang telah berinvestasi dalam bentuk bangunan fisik sebagai sarana akomodasi dan rumah makan. Adanya bentuk investasi ini, menyebabkan terjadi penyerapan tenaga kerja dari masyarakat lokal.

Begitu juga dengan hasil penelitian Suyanto et al. (2019) yang menjelaskan bahwa potensi desa dapat di buat dengan memanfaatkan ekosistem mangrove untuk menarik para wisatawan datang ke desa. Hal ini dilakukan di desa wisata Kampung Laut. Ekowisata tidak terlepas dari kegiatan konservasi dan pemberdayaan sosial budaya ekonomi lokal. Agar desa bisa berkembang, *stakeholder* perlu memperhatikan alternatif dan partisipasi dari masyarakat setempat untuk mengelola sumber daya alam dan sosial ekonomi budaya yang ada, yang diharapkan agar masyarakat bisa sejahtera dan lingkungan tempat tinggal mereka bisa terjaga. Sehingga dapat disimpulkan Desa Wisata tidak hanya tentang kesenian dan barang yang diperjualbelikan kepada wisatawan, tetapi juga potensi alam dapat menjadi daya tarik yang khas dari suatu wilayah untuk mengembangkan desa.

Peningkatan perekonomian masyarakat dengan memaksimalkan potensi desa melalui Desa Wisata juga di dukung dengan hasil penelitian Santoso (2022) menyatakan bahwa masyarakat yang berada di desa wisata mampu merasakan manfaat yang ditimbulkan dari program yang dijalankan di desa tersebut seperti peningkatan ekonomi. Dimana sebagian masyarakat Indonesia memiliki potensi mengembangkan wilayahnya menjadi kawasan pariwisata. Jika pengelolaan yang berkelanjutan dapat dicapai, maka akan menjadi peluang bisnis yang sangat menjanjikan. Dapat menjadi daya tarik konsumen/wisatawan, bukan hanya sekedar membuka wisata. Hal ini menuntut masyarakat di desa wisata untuk selalu melakukan inovasi agar para wisatawan ingin datang ke desa mereka, sehingga para wisatawan mampu menikmati destinasi wisata yang tersedia di tempat itu, yang nantinya mampu mengubah ekonomi masyarakat sekitar.

Kontribusi masyarakat di desa Wisata Aik Bual, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, telah berhasil menjadikan desa wisata Aik Bual sebagai desa wisata dengan daya tariknya berupa Embung Desa yang separuhnya dikelilingi hutan desa dan persawahan serta Air Terjun Nyeredep. Hal ini dijelaskan dalam jurnal Muhamad Rifki Alwiansah (2022) dimana bentuk-bentuk peran masyarakat Desa Aik Bual dalam pengembangan objek wisata ini berupa: a. Peran masyarakat berupa pemikiran dengan memberikan ide-ide yang diambil sebagai tekad bersama untuk mengembangkan potensi objek wisata; b. Peran masyarakat dalam bentuk tenaga yaitu menjadikan objek wisata yang bersih, aman, dan nyaman untuk di

kunjungi; c. Peran masyarakat dalam bentuk *skill* atau keahlian yaitu meningkatkan daya tarik wisata dengan keahlian yang dimiliki sehingga objek wisata dapat berkembang sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

Selanjutnya, dalam jurnal Dianasari (2019) dijelaskan bahwa peran masyarakat di Desa Nyambu yang berada di Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Bali, telah berhasil mengembangkan Desa Nyambu sebagai Desa Wisata Ekologis (DWE). Dalam pengembangannya terdapat beberapa jenis partisipasi masyarakat untuk mewujudkan desa wisata yang berbasis masyarakat yaitu: partisipasi manipulatif, partisipasi pasif, partisipasi konsultatif, partisipasi insentif, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, partisipasi mandiri. Berdasarkan beberapa jenis partisipasi diatas dapat dilihat partisipasi masyarakat dalam mengembangkan DWE Nyambu yang paling tertinggi adalah partisipasi interaktif yaitu 86,384. Hal ini dikarenakan keterlibatan masyarakat dalam merencanakan program dan membentuk lembaga di DWE Nyambu mengikutsertakan berbagai lapisan masyarakat, seperti tokoh-tokoh masyarakat hingga kaum muda. Masyarakat juga ikut terlibat dalam pengontrolan dalam segala implementasi keputusan.

Lebih lanjut dalam jurnal Agi Silva Aransha dan V. Indah Sri Pinasti (2018) dijelaskan bahwa kontribusi masyarakat di Desa Wisata Brayut, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah berhasil membuat Desa Wisata Brayut ini dikenal sebagai Desa Wisata berdasarkan pada budaya dan pertanian. Dengan kontribusi masyarakatnya berupa pengelolaan masyarakat lokal, kolaborasi dan pengembangan hubungan yang berkelanjutan antara berbagai elemen masyarakat. Ada beberapa bentuk kontribusi masyarakatnya dalam mengembangkan Desa Wisata Brayut ini yaitu a. Kontribusi pemikiran yaitu partisipasi masyarakat desa wisata Brayut dalam memberikan ide-ide atau mengonsepkkan desa wisata. Dimana desa wisata ini awal mula ada dari salah satu warga di desa tersebut; b. Kontribusi sarana terkait sarana Desa Wisata Brayut diawali dengan penunjukan Joglo 1 sebagai kantor administrasi Desa Wisata Brayut; c. Kontribusi tenaga, terlihat dari ikut sertanya masyarakat dalam hal tenaga dan usaha. Kontribusi ini berkaitan dengan beberapa tahapan yaitu tahapan perencanaan atau persiapan, tahapan pelaksanaan atau implementasi, serta setelah kegiatan yang ditampilkan di desa wisata ini; d. Kontribusi dana merupakan sumbangan yang diberikan oleh beberapa pihak untuk Desa Wisata Brayut, selain itu didapat dari pendapatan atau kas desa wisata.

Partisipasi yang sama juga dijelaskan dalam jurnal Putra (2020) akan tetapi dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat di Desa Wisata Carangsari, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung terbilang masih minim atau pasif. Masyarakat tidak diikutsertakan dalam upaya memajukan desa wisata Carangsari. Dalam pengembangan desa wisata ini ada 4 tahapan yang harus melibatkan partisipasi masyarakat yaitu: formulasi (perencanaan), implementasi (pelaksanaan pembangunan), pengelolaan, dan evaluasi. Namun pada kenyataannya hanya ada 2 tahapan yang melibatkan partisipasi

masyarakat yaitu, pelaksanaan pembangunan dan evaluasi. Tahapan lain yang belum optimal yaitu tahapan pengelolaan dan perencanaan, di mana peran masyarakat belum dilibatkan secara penuh dalam tahapan ini. Di samping itu terdapat 2 faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat yaitu internal dan eksternal. Faktor internal yang dimaksud yaitu rendahnya pemahaman masyarakat tentang desa wisata yang ditimbulkan dari kurangnya sosialisasi, tidak terdapat lembaga yang mengelola desa wisata untuk memformulasi suatu program atau kegiatan dan arah pengembangan desa wisata agar terlihat mempunyai kemampuan untuk mengelola harga, masih minimnya kemampuan masyarakat yang ada di bidang pariwisata, dan belum terdapat pemetaan atau data terkait keunggulan produk yang ada di desa wisata sehingga keunikan yang dimiliki oleh desa belum mampu terangkat. Sedangkan faktor eksternal yaitu belum ada yang membahas kajian terkait desa wisata secara akademisi agar mampu mengembangkan desa wisata sesuai pada prinsip pariwisata berbasis masyarakat yang manfaatnya dirasakan oleh masyarakat, masyarakat yang berada di desa wisata tersebut tidak menguasai keunggulan atau potensi yang ditawarkan oleh desa mereka, masih minimnya sumber dana yang diberikan dari pemerintah di Kabupaten Badung untuk mengembangkan desa wisata yang berdampak pada keterlibatan masyarakat yang minim serta kesulitan dalam menjalankan kegiatan yang telah direncanakan, masih minim lembaga profesional yang membuat kegiatan pemberdayaan sumber daya manusia untuk meningkatkan kompetensi masyarakat agar mampu menghadapi wisatawan, dan belum adanya pemasaran yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Daerah maupun swasta untuk menarik para wisatawan agar datang ke desa wisata.

Dalam jurnal Frasawi (2018) bahwa keterlibatan masyarakat yang berada di Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada rata-rata masih terhitung rendah dalam mengembangkan Desa wisata Ambengan. Berdasarkan hasil penelitian ini dijelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam kategori rendah sebanyak 90%, keterlibatan masyarakat tergolong sedang sebanyak 8,3%, dan yang tergolong tinggi hanya sebanyak 1,6%. Rendahnya keikutsertaan masyarakat dipengaruhi oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain itu, fokusnya terbagi antar sektor pertanian dan pariwisata, karena masyarakat yang terlibat dalam pengembangan pariwisata memiliki kegiatan berbeda. Kendala dalam mengembangkan Desa Wisata Ambengan di antaranya adalah: 1. Aspek aksesibilitas, kondisi jalan yang dimiliki oleh masyarakat desa agar para wisatawan bisa menuju objek wisata dalam keadaan rusak; 2. Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh masyarakat dalam mendukung segala aktivitas pariwisata masih tergolong belum memadai; 3. Akomodasi perhotelan atau penginapan yang ada di desa tersebut masih belum ada, sehingga wisatawan yang ingin ke desa tersebut harus menginap jauh dari objek wisata; 4. Promosi objek wisata yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk memperkenalkan keunikan yang dimiliki oleh desa mereka masih minim, sehingga banyak wisatawan yang belum

tahu keunikan yang dimiliki oleh desa wisata Ambengan; 5. Kualitas dan kuantitas masyarakat setempat tergolong masih rendah. Hal ini dikarenakan belum adanya pemberdayaan masyarakat yang ada di desa wisata tersebut.

Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tentunya diukur dengan banyaknya masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam menyukseskan sebuah program yang dijalankan. Adanya sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat yang baik tentunya akan menjadi sebuah faktor penting yang menentukan keberhasilan suatu program. Pelaksanaan Program tersebut tentunya ada faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam melaksanakan program desa wisata. Untuk mengantisipasi permasalahan tersebut maka pemerintah desa harus mempunyai strategi untuk mencari jalan keluar untuk mencapai keberhasilan program. Peranan dari pemerintah untuk melakukan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan adanya program-program desa merupakan hal yang dapat menjadikan suatu program desa mampu berjalan dengan baik. Selain itu pengelolaan terhadap SDA dan juga pemberdayaan terhadap masyarakat yang baik merupakan langkah awal keberhasilan sebuah program. Pemerintah desa juga harus mempertimbangkan adanya faktor-faktor penunjang maupun penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya sebuah program.

Kebijakan Strategi Pelestarian Budaya Melalui Mekanisme Desa Wisata

Dalam rangka mendorong daya saing industri pariwisata di suatu daerah, maka perlu mempertimbangkan kemungkinan dan keterbatasan daerah dalam menetapkan zona dan destinasi wisata. Potensi daerah yang unik menawarkan peluang untuk menggerakkan wisatawan lokal, nasional dan asing. Pariwisata budaya saat ini dianggap sebagai sektor pariwisata yang berkembang pesat, hal ini dikarenakan para wisatawan cenderung lebih tertarik dengan sesuatu yang memiliki keunikan dan kekhasan. Wisata budaya mampu memberikan dampak yang positif secara ekonomi maupun sosial budaya Wibawa & Budiasa (2018) Wisata budaya dapat menciptakan interaksi positif antar masyarakat setempat dan wisatawan yang berkunjung. Selain itu, perlu dikembangkan ruang publik dan infrastruktur yang memadai, yang diharapkan mampu berdampak positif bagi objek wisata Wibawa & Budiasa (2018).

Oleh karena itu, semua potensi dan kendala yang ada dalam kebijakan pengembangan pariwisata harus dipertimbangkan dan dianalisis. Potensi pariwisata lokal dan nasional memegang peranan penting dalam perekonomian lokal dan nasional. Hal ini mengacu pada daya beli wisatawan, sumber pendapatan bagi masyarakat lokal dan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Strategi yang dapat dilakukan sebagai berikut:

- a. Strategi *strength opportunities*. *Strenght opportunities* bertujuan untuk mengandalkan peluang yang ada di sekitar lingkungan eksternal. Strategi yang tepat adalah menciptakan *branding* untuk desa wisata. Branding yang berani dan menarik akan menarik konsumen dan masyarakat umum, sehingga mereka tertarik untuk datang kembali.

- b. Strategi *strength threat*. Strategi ini mengandalkan kekuatan yang ada untuk menghadapi situasi ancaman. Hal ini berguna untuk memasarkan potensi yang dimiliki oleh desa wisata, selain itu untuk menjaga kebiasaan dan karakteristik masyarakat lokal. Melestarikan keindahan lokal adat istiadat setempat akan meningkatkan jumlah wisatawan domestik dan asing. Wisatawan mancanegara lebih menyukai wisata budaya atau *cultural tourism* karena mereka ingin mengetahui kebudayaan atau adat istiadat yang ada di Indonesia.
- c. Strategi *weakness opportunities*. Ini di rancang untuk memanfaatkan peluang yang ada dan meminimkan kelemahan. Strategi ini digunakan untuk mempromosikan dan menawarkan daya tarik suatu desa wisata. Hal ini berguna agar tempat wisata yang dulunya sempat ditinggalkan wisatawan kembali menarik untuk dikunjungi.
- d. Strategi *weakness threat*. *Weakness threat* merupakan strategi yang digunakan agar mampu bertahan dengan menghindari ancaman dan meminimalkan kelemahan. Upaya yang bisa dilakukan seperti meningkatkan promosi keunikan dan keunggulan yang dimiliki oleh suatu wisata budaya. Untuk mempromosikan daya tarik wisata budaya dan meningkatkan profilnya di luar negeri, pengelola perlu lebih proaktif dalam melibatkan pemangku kepentingan pariwisata. Pengelola desa wisata budaya perlu memanfaatkan internet serta menyebarkan brosur yang menggambarkan secara sederhana tetapi menarik tentang daya tarik desa budaya tersebut, hal ini untuk memberikan gambaran bagi para wisatawan agar mau berkunjung ke desa wisata tersebut.

Salah satu penelitian oleh Ulul Azmi (2021) menyebutkan masyarakat dapat melakukan hal ini dengan berbagai cara untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal. Ada beberapa cara anggota masyarakat, terutama generasi muda, dapat mendukung pelestarian budaya dan berpartisipasi dalam pelestarian budaya lokal. salah satunya terletak di Desa Muaro Jambi, kecamatan Muaro Sebo. Desa ini mempunyai banyak kebudayaan dan seni seperti tari topeng, zikir beredah, dul muluk, rebana kecil (hadroh), besuto (krino), kato bejawab atau seloko adat. Terdapat beberapa tradisi tahunan yang dilakukan setiap tahun sekali di desa ini seperti tradisi yang di lakukan di acara-acara pernikahan seperti rebana kecil (hadrah) dan besuto (krino), selain itu ada pencat silat, tari topeng, zikir beredah, dul muluk. Perubahan zaman menyebabkan suatu budaya hilang atau menjadi kabur dari waktu ke waktu jika kita tidak berusaha untuk memelihara sendiri. Pertunjukkan rutin ini dimaksudkan untuk mengenalkan kepada wisatawan terkait budaya dan seni yang ada di desa Muaro Jambi. Diharapkan pertunjukkan ini dapat menyebarkan budaya Desa Muaro Jambi dan meningkatkan jumlah wisatawan. Pementasan seni juga diadakan untuk melestarikan adat istiadat Desa Muaro Jambi agar cucu dan cicit masih mengenal kebudayaan yang dimiliki Desa Muaro. Ditambah dengan rujukan dari penelitian Pranata (2022) yang membahas mengenai hasil dari tenunan songket Pandai Sikek memiliki ciri khas seperti

penggunaan benang emas dan perak yang diaplikasikan dan diolah secara tradisional dengan berbagai motif, dan bentuk flora dan fauna yang ditransformasikan menjadi geometri. Songket dalam tradisi dan kehidupan masyarakat Minangkabau adalah seperangkat pakaian yang digunakan dalam berbagai upacara adat. Pakaian inilah menunjukkan seberapa tinggi status dan pengaruh mereka di masyarakat. Sehingga dapat dilihat bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki keunikan budaya, seni, dan suku yang dapat menarik perhatian dunia.

Kebijakan Desa Wisata Berkonsep Budaya akan menjadi Wadah Pelestarian Warisan Leluhur

Seperti hasil dari penelitian Febriana & Pangestuti (2018) menunjukkan bahwa kajiannya di Desa Wisata Gubugklakah memiliki keanekaragaman kebudayaan yang diturunkan oleh leluhur. Mulai dari pakaian lokal yang khas, kepercayaan masyarakat, adat istiadat, hingga kesenian. Adanya pengembangan kepariwisataan telah mampu melestarikan kebudayaan masyarakat, salah satunya terlihat dari pelestarian kembali kesenian wayang topeng yang sempat ditinggalkan oleh masyarakat. Masyarakat juga telah menerapkan perilaku hidup bersih karena tuntutan untuk memberikan pelayanan kepada wisatawan yang datang. Sehingga secara tidak langsung masyarakat akan lebih sadar dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan desanya agar

Hal ini sejalan dengan konsep yang di terapkan pada salah satu provinsi yang terkenal dengan destinasi wisatanya yaitu Provinsi Bali. Provinsi ini memiliki Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali yang menjelaskan fokus dari pariwisata Bali adalah wisata budaya. Wisata budaya merupakan jenis wisata yang menampilkan kebudayaan yang dimiliki oleh Bali dan mayoritas masyarakat beragama Hindu. Sehingga dalam penelitiannya Wibawa & Budiasa (2018) menyebutkan bahwa masyarakat sekitar desa wisata terutama penduduk asli yang berada di sekitar tempat wisata, merupakan kunci utama pariwisata dikarenakan sebagian besar atraksi yang menjadi daya tarik wisatanya disajikan oleh mereka yang menyebutkan bahwa jika masyarakat lokal mendapatkan manfaat dari keberadaan desa wisata yang berkembang maka akan memunculkan dampak terhadap minat partisipasi masyarakat lokalnya. Mendukung keterlibatan masyarakat untuk memberikan nilai tambah bagi kawasan desa, objek wisata, lingkungan alam, dan mencegah terjadinya konflik yang muncul dari program pariwisata yang diimplementasikan, yang biasanya memberikan dampak pada lingkungan sekitar tempat wisata.

Hal tersebut di dukung oleh hasil penelitian Endang Sulistiyani (2020) yang menyebutkan bahwa pada wilayah penelitiannya di salah satu Desa Wisata di Jawa Tengah ditemukan bahwa produk kerajinan yang dihasilkan oleh Desa wisata Kenep telah mampu memasuki pasar ekspor dan memiliki banyak pelanggan asing yang berkunjung di desa wisata kelurahan Kenep. Para wisatawan tersebut ingin mempelajari dan melihat secara langsung bagaimana pembuatan kerajinan tersebut.

Kerajinan yang ada di sentra industri seni Kenep adalah sektor industri berbasis ide, bakat, dan kreativitas. Dengan demikian, desa wisata tersebut memiliki tingkat kreativitas dan jiwa wirausaha yang tinggi untuk melestarikan dan mempromosikan keunikan budaya dan seni pertunjukkan tradisionalnya, serta memiliki keunggulan kompetitif dan produktivitas yang tinggi, yang disebut desa wisata. Sedangkan desa wisata Sukoharjo mempunyai kesenian tradisional seperti tarian Jurit, teater rakyat kebo kinul, Pentas wayang kulit, karawitan dan tari jathilan sebagai daya tarik wisatawan. Generasi muda yang terdapat di beberapa desa mempelajari kesenian tradisional ini yaitu nyantrik gawe wayang kulit, ajar nabuh gamelan dan ajar tari jaran kepang. Perkembangan mempromosikan kekayaan budaya bangsa melalui wadah Desa Wisata disambut baik oleh pemerintah dengan memberikan fokus pendanaan dikelola oleh desa (Dana Desa) yang cukup signifikan untuk menggali potensi, memfokuskan pengembangan dan pembangunan dari desa wisata agar pariwisata berkelanjutan dapat terealisasi.

Tentu banyak faktor yang ikut mempengaruhi perkembangan Desa Wisata, mulai dari faktor internal dan eksternal seperti yang diungkapkan oleh Wira Darma (2019) dijelaskan bahwa agar pengembangan sebuah desa wisata selalu menjadi prioritas yang nantinya akan menjadi kunci dari terbukanya peluang berkembangnya suatu desa secara pesat diperlukan komitmen dari beberapa aktor seperti pimpinan daerah (Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah terkait), Dinas PUPR serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan masyarakat desa wisata harus dibuat, disepakati dan dilaksanakan dengan melibatkan berbagai aktor atau *stakeholder* yang ada di desa wisata tersebut terutama komunitas pemuda, komunitas usaha dan pemerintah desa yang diharapkan mampu bekerja sama dan merasa memiliki untuk mengembangkan desa wisata. Dengan melibatkan semua unsur akan mampu menciptakan kelompok masyarakat yang terampil dan mampu mengelola potensi yang ada seperti SDM. Selain itu, dengan memberdayakan masyarakat diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan terutama untuk kaum muda sehingga terciptanya kemandirian ekonomi bagi masyarakat desa.

KESIMPULAN

Desa wisata merupakan program yang tepat untuk dilakukan oleh pemerintah agar membantu perekonomian masyarakat sekitar dan memperkenalkan potensi yang dimiliki di setiap desa. Pengembangan desa wisata merupakan program atau kebijakan pembangunan desa yang bertujuan untuk mendiversifikasi desa. Desa wisata akan dibuat menjadi desa berbasis industri pariwisata, yang menawarkan usaha jasa maupun niaga seperti produk-produk wisata. Dalam perkembangannya desa wisata dapat diartikan sebagai kegiatan menggali keunikan yang dimiliki oleh setiap desa, baik secara alam, budaya, sosial atau unsur lain yang dapat dimanfaatkan untuk menarik para wisatawan dan melestarikan kekayaan alam dan sejarah sebuah desa.

Pengembangan desa wisata dapat memberikan dampak pada perkembangan perekonomian masyarakat di desa wisata tersebut. Perkembangan perekonomian tersebut dapat berdampak naik maupun tidak memberikan efek pada ekonomi masyarakat di desa. Peningkatan perekonomian terjadi akibat dari banyaknya wisatawan asing yang berkunjung di desa wisata, selain itu masyarakat lokal juga dapat membuka usaha makanan atau jasa sehingga masyarakat lokal mendapatkan pemasukan dari kunjungan wisatawan tersebut.

Dalam mendukung program desa wisata tentu perlu peran berbagai macam *stakeholder* agar masyarakat di desa tersebut mampu mengenali potensi desa. Ketidakmampuan masyarakat desa untuk memperkenalkan potensi yang dimiliki akan membuat desa tersebut kurang menarik di mata wisatawan. Hal ini akan mempengaruhi perekonomian masyarakat di desa tersebut. Sehingga beberapa desa wisata mampu meningkatkan perekonomian desa. Namun, dalam beberapa penelitian yang peneliti sampaikan dapat dilihat bahwa tidak semua desa wisata mampu membangun *branding* desa mereka, sehingga tidak semua desa wisata mampu meningkatkan perekonomian desa mereka. Sehingga sebelum suatu desa dijadikan desa wisata perlu sosialisasi dan pelatihan bagi masyarakat lokal di desa tersebut sehingga mereka mampu mengembangkan desa yang mereka miliki. Pelatihan, pemberdayaan, dan sosialisasi kepada masyarakat merupakan hal yang sederhana dan penting tetapi sering diabaikan oleh para *stakeholder*. Pelatihan dan sosialisasi ini diberikan agar masyarakat desa mampu mengelola dan membangun *branding* yang dimiliki di desa mereka. Contoh pelatihan yang dapat dilakukan yaitu seperti usaha apa yang cocok untuk ditampilkan agar lebih menarik para wisatawan. Desa wisata berkonsep budaya dapat dijadikan daya tarik dari desa tersebut, hal ini dikarenakan keanekaragaman budaya yang dimiliki Indonesia sangat menarik jika dapat menjadi daya tarik wisatawan asing, sekaligus memperlihatkan dan memperkenalkan budaya yang dimiliki di setiap desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agi Silva Aransha dan V. Indah Sri Pinasti. (2018). *Kontribusi Masyarakat Desa Dalam Mengembangkan Desa Wisata Brayut Kabupaten Sleman*.
- Annatasya Yunita Nugroho, A. Z. R. K. K. (2022). *Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Desa Wisata Nongkosawit Kota Semarang*. <https://Ejournal3.Undip.Ac.Id/Index.Php/Jppmr/Article/View/33577>, Vol.11, No.2.
- Dewi, M. H. U. (2013). *Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali*. *Jurnal Kawistara*, 3(2). <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Dianasari, D. A. M. L. (2019). *Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Nyambu Sebagai Desa Wisata Ekologis*. *Jurnal Kepariwisata*, 18(2).
- Endang Sulistiyani (2020). *Model Pengembangan Desa Kreatif Berkarakter Budaya Lokal*. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Polines*, Vol. 3, 1118–1127.

- Febriana, Y. E., & Pangestuti, E. (2018). *Analisis Dampak Pengembangan Kepariwisata Dalam Menunjang Keberlanjutan Ekonomi dan Sosial Budaya Lokal Masyarakat (Studi pada Desa Wisata Gubugklakah, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang)* Yusrisa. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 61(4).
- Frasawi, E. S. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Ambengan Kecamatan Sukasada*. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jjpg.v6i3.20704>
- Hary, H. (2016). *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. *Jurnal Pariwisata*, 3(2).
- Mertha, I. W., Wiarti, L. Y., & Suasapha, A. (2018). *Stakeholders: Peran dan Kendala Pelibatangannya dalam Pengembangan Desa Wisata di Bali*. *Jurnal Kepariwisata*, 17(2).
- Muhamad Rifki Alwiansah (2022). *Peran Masyarakat Dalam Pengembangan Objek Wisata Di Desawisata Aik Bual Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah*. 2. No 1.
- Paresh Joshi. (2012). *A Stakeholder Networking For Sustaineble Rural Tourism Development In Konkan Region of Maharashtra State (India)*. *Collage Of Agricultural Economics And Marketing*, Vol 1(IX).
- Pranata, H. (2022). *Analisis Potensi Pengembangan Nagari Pandai Sikek Kabupaten Tanah Datar Sebagai Desa Wisata Kerajinan Songket*. *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya*, 7(1). <https://doi.org/10.36982/jsdb.v7i1.2033>
- Putra, D. P. B. P. (2020). *Pengembangan Desa Wisata Carangsari Dan Partisipasi Masyarakat Lokal*. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, 22(2). <https://doi.org/10.14203/jmb.v22i2.838>
- Ratnaningtyas, Y. A., & Widyasmoro, A. (2017). *Pemasaran Desa Wisata Kalibuntung Dalam Mendukung Pengembangan Pariwisata Di Kabupaten Bantul*. *Jurnal Kepariwisata Indonesia: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Kepariwisata Indonesia*, 11(1 SE-Articles).
- Rezza Abdy Pradana (2016). *Analisis Program Pembangunan Desa Wisata Wonolopo Di Kota Semarang*. *Journal of Politic and Government Studies*, Vol 6, No.1.
- Santoso, I. B. (2022). *Membangun Ekonomi Kreatif melalui Wisata Batik sebagai Upaya Membangkitkan Perekonomian Lokal di Era Kebiasaan Baru Desa Wisata Jarum Bayat*. *Media Wisata*, 20(1). <https://doi.org/10.36276/mws.v20i1.306>
- Singgih, M. N. (2020). *Strategi Pengelolaan Potensi Desa Pujon Kidul sebagai Destinasi Desa Wisata di Kabupaten Malang*. *Seminar Nasional Kepariwisata (SENORITA) ...*, 1(1).
- Suyanto, E., Wardiyono, Fx., & Widyastuti, T. R. (2019). *Rekayasa Sosial Alternatif Model Revitalisasi Kebijakan Pengelolaan Ekowisata Mangrove Berbasis Cluster Potensi Lokal Desa Wisata Kampung Laut Segara Anakan – Cilacap*. *Jurnal Ilmu Lingkungan* 2(2).
- Syaifudin, M. Y., & Ma'ruf, M. F. (2022). *Peran Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Dan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Desa Wisata (Studi Di*

- Desa Jurug Kabupaten Ponorogo*). Publika. [https://doi.org/ 10.26740/publika.v10n2.p365-380](https://doi.org/10.26740/publika.v10n2.p365-380)
- Ulul Azmi, D. A. (2021). *Desa Muara Jambi Sebagai Desa Wisata Berbasis Budaya Lokal 2009 – 2017*. Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari, 4(2). <https://doi.org/10.33087/istoria.v4i2.84>
- Wahyuni, D. (2018). *Strategi Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul*. Aspirasi, Vol. 09 No(Jurnal Masalah-Masalah Sosia).
- Walidaya. (2013). *“Implementasi Undang-Undang Nompur 6 Tahun 2014 Dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Menjalankan Tertib Administrasi Desa Di Desa Rukam Kec. Taman Rajo Kab. Muara Jambi.”* Africa’s Potential for the Ecological Intensification of Agriculture.
- Wibawa, M. I., & Budiasa, I. G. S. (2018). Pengaruh Kebijakan Pemerintah, Partisipasi Masyarakat Dan Kewirausahaan Terhadap Kualitas Destinasi Wisata Pura Taman Ayun. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2018.v07.i06.p07>
- Wira Darma, IK. (2019). *Implementasi Pembangunan Desa Wisata Di Desa Bakas Kecamatan Banjarangkan Kabupaten Klungkung Provinsi Bali*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri Program Studi Politik Pemerintahan.
- Zed, M. (2008). Metode Penelitian Kepustakaan. *Yayasan Obor Indonesia*.
- Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.26/UM.001/MKP/2010 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Melalui Desa Wisata
- Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: PM.26/UM. 001/MKP/2010 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025